

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023

Muhammad Giri Ainul Yaqien¹
muhammadgiri25@gmail.com

Deris Desmawan³
derisdesmawan@untirta.ac.id

Hady Sutjipto²
hadysutjipto@untirta.ac.id

Muhammad Nasim Harahap^{4*}
muhammad.nasim@untirta.ac.id

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Raya Palka No.Km.3, Serang, Indonesia

Abstract

This research was conducted with the aim of determining whether or not there is an influence of the Human Development Index, Capital Expenditure, Employee Expenditure and Population Density factors on Regional Financial Independence in 93 Regencies and Cities on the Island of Java in 2016-2023. This research uses secondary data from panel data for 8 (eight) years 2016-2023. Data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Statistics Agency were processed using the Eviews 10 application. The results of this research partially show that the Human Development Index variable has a significant effect on Regional Financial Independence, the Capital Expenditure variable has no effect on Regional Financial Independence, the Employee Expenditure variable has an effect significant effect on Regional Financial Independence, and Population Density has a significant effect on Regional Financial Independence. Simultaneous results of the variables Human Development Index, Capital Expenditures, Employee Expenditures, and Population Density have a significant effect on the Financial Independence of Regencies and Cities on the Island of Java in 2016-2023. The results of the coefficient of determination test produce that the independent variable influences the dependent variable by 92.76% and the remaining 7.24% is explained by other variables not included in the regression and panel estimation models in this study.

Keywords

financial independence; hdi; panel data

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari faktor Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 93 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data panel selama 8 (delapan) tahun 2016-2023. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik diolah menggunakan aplikasi Eviews 10. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023. Hasil uji koefisien determinasi menghasilkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 92,76% dan sisanya sebanyak 7,24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model estimasi regresi dan panel pada penelitian ini.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, IPM, Data Panel

* Corresponding Author

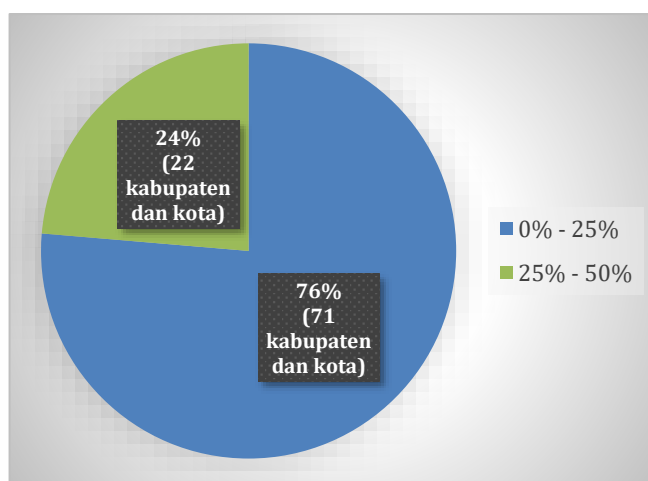
Pendahuluan

Halim (2007) berpandangan kemandirian keuangan daerah ialah keahlian pemerintah daerah menggali sumber PAD guna membiayai keperluan rutin serta pembangunan tanpa harus bergantung secara signifikan pada bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat.

Pulau Jawa adalah pusat ekonomi dan populasi Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional sebesar 57,7% pada Kuartal I tahun 2024. Bahkan jumlah penduduknya pun

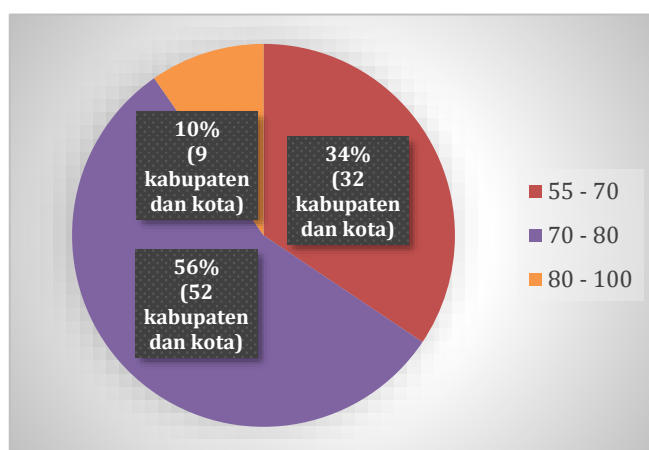
56% dari total penduduk di Indonesia. Namun, disparitas antar daerah di Jawa masih cukup tinggi. Beberapa daerah memiliki PAD yang tinggi sementara lainnya sangat bergantung pada dana transfer. Periode 2016-2023 mencakup beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah, termasuk perubahan kebijakan fiskal, implementasi berbagai regulasi baru, dan dampak pandemi COVID-19.

Tingkat kemandirian keuangan daerah 93 kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang digunakan dalam penelitian ini masih didominasi oleh yang belum memiliki tingkat kemandirian di atas 50% yang artinya daerah-daerah tersebut belum mampu membiayai bahkan setengah dari urusan pemerintahan daerahnya sendiri.



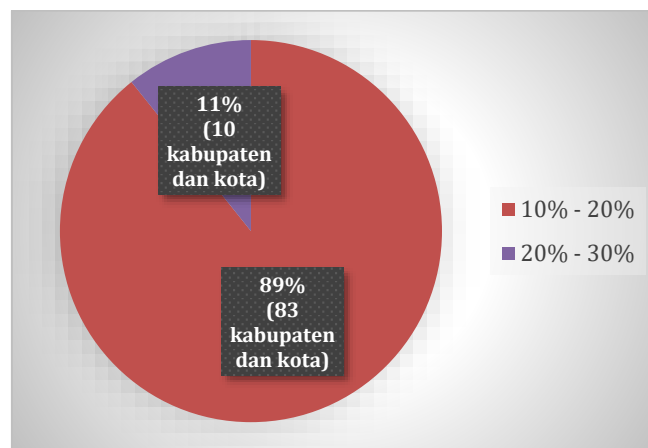
Gambar 1. Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah (%) Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016-2023

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

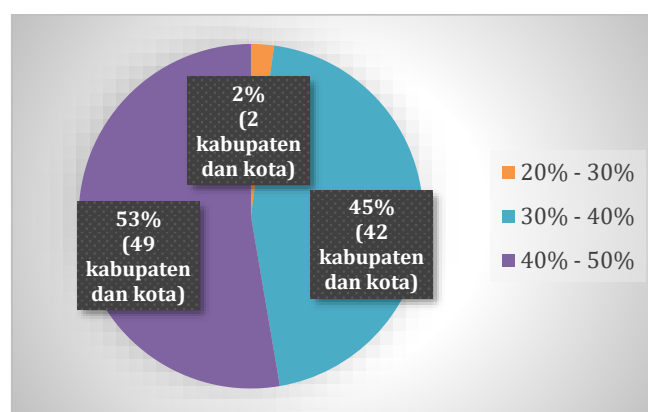


Gambar 2. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023

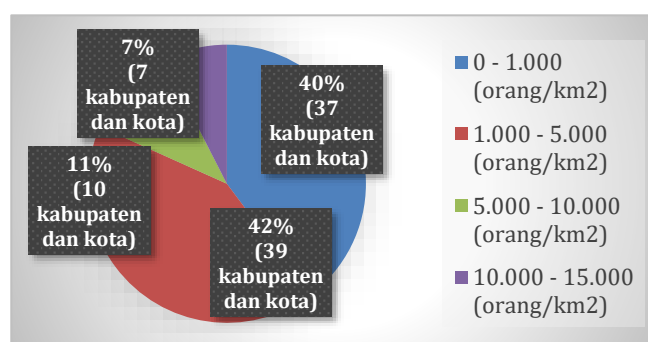
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 3. Rata-Rata Belanja Modal terhadap Rata-Rata Total Belanja Daerah (%) Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016-2023
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)



Gambar 4. Rata-Rata Belanja Pegawai terhadap Rata-Rata Total Belanja Daerah (%) Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016-2023
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)



Gambar 5. Rata-Rata Kepadatan Penduduk (orang/km2) Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa 2016-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, yang dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pajak. Sedangkan dari 93 daerah hanya sebanyak 9 daerah dengan indeks di atas 80 dan terkategori sebagai daerah dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi.

Pembangunan daerah yang perlu terus ditingkatkan fasilitas pelayanannya demi mendukung kegiatan masyarakat dan menarik investor maka belanja modal diperlukan alokasinya. Dengan fasilitas umum yang baik, kepuasan masyarakat akan meningkat dan investor pun akan tertarik untuk berinvestasi bahkan pemerintah melalui UU HKPD 2022 telah menetapkan target alokasi minimum sebesar 40% untuk belanja modal (BPK, 2022) sedangkan daerah-daerah yang digunakan dalam penelitian ini masih belum ada yang menyentuh angka 40% secara rata-rata sepanjang tahun 2016-2023.

Proporsi belanja pegawai yang besar dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif lainnya, seperti belanja modal. Oleh karenanya pada pengalokasiannya memerlukan efisiensi dan presisi yang tinggi agar pembelanjaannya tidak melewati batas 30% yang ditetapkan UU HKPD 2022 (BPK, 2022) sedangkan dari 93 daerah yang digunakan dalam penelitian ini baru hanya 2 daerah yang sudah berada di bawah angka 30% secara rata-rata sepanjang tahun 2016-2023.

Kepadatan penduduk yang tinggi meningkatkan permintaan barang dan jasa. Ini merangsang pertumbuhan bisnis lokal dan menciptakan lebih banyak peluang usaha, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak usaha dan retribusi lainnya. Sedangkan pada daerah dalam penelitian ini, 40%-nya didominasi oleh kepadatan penduduk di bawah 1.000 orang/km² yaitu sebanyak 32 daerah.

Analisis kemandirian keuangan daerah di Pulau Jawa akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kemandirian keuangan di daerah yang secara ekonomi sangat signifikan ini. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kebijakan di daerah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Kepadatan Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah baik

secara parsial maupun secara simultan pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023.

Landasan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Oates (1993) menyebutkan bahwa otonomi fiskal pemerintah daerah memberikan kelembagaan yang terbaik dengan latar belakang persaingan pajak antar daerah dan, dalam jangka panjang, memastikan pemerataan keuangan. Menurutnya, di negara-negara OECD desentralisasi fiskal merupakan prasyarat peningkatan produk regional bruto. Selain itu, tingkat kesejahteraan rata-rata di daerah yang memiliki otonomi fiskal yang luas jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang tidak menerapkannya. Oates menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan dan preferensi lokal secara lebih efisien (Pasichnyi et al., 2019). Berikut rumus penghitungan untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Halim, 2007:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Saat pendapatan asli daerah lebih besar daripada sumber penyumbang lain, maka hubungan fiskal antara pusat dengan daerah tersebut dianggap baik. Berikut rasio yang digunakan untuk menentukan kategori kemandirian keuangan suatu daerah.

Amartya Sen memperkenalkan pendekatan kemampuan (*Capability Approach*) yang menjadi dasar konseptual untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Sen, pembangunan manusia harus dilihat sebagai aktivitas memperluas kebebasan nyata yang dinikmati oleh orang-orang. IPM didasarkan pada tiga dimensi utama: kesehatan (sehat dan panjang umur), pendidikan (pengetahuan), dan kelayakan hidup. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus mengarah pada peningkatan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai (Sen, 1999).

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kategori Kemandirian	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	>0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2007)

Adapun kategori tingkat indeks pembangunan manusia yaitu:

- 0 – 55: Pembangunan manusia rendah.
- 55 – 70: Pembangunan manusia sedang.
- 70 – 80: Pembangunan manusia tinggi.
- 80 – 100: Pembangunan manusia sangat tinggi (Fukuda-Parr & Kumar, 2003).

Musgrave mengemukakan bahwa belanja modal pemerintah merupakan investasi dalam aset jangka panjang yang penting untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya juga mencakup investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi dalam perekonomian (Musgrave, 1989). Permendagri No. 13 tahun 2006 memberikan pengertian belanja modal sebagai ongkos yang dikeluarkan pemerintah guna membeli atau membangun aktiva tetap yang berbentuk riil dengan usia ekonomis lebih dari satu tahun dan dapat digunakan untuk aktivitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah. Aset tetap ini termasuk peralatan, tanah, gedung, jalan, mesin, irigasi, jaringan, bangunan, serta yang lain (BPK, 2006). Karenanya, pemerintah melalui UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur agar daerah mengalokasikan belanja modalnya minimal 40% dari total belanja daerahnya.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri ialah sebuah unsur pengeluaran rutin pada anggaran pemerintah dan diistilahkan sebagai belanja pegawai (Sukirno, 2006). Buchanan menyatakan bahwa pegawai pemerintah cenderung memperbesar anggaran mereka untuk memaksimalkan utilitas pribadi mereka, yang bisa berujung pada inefisiensi dan pembengkakan biaya pemerintah. Belanja pegawai dalam konteks ini dipandang sebagai hasil dari interaksi antara birokrat dan politikus yang saling berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan masing-masing (Buchanan, 1962).

Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Variabel + Honorarium + Tunjangan Khusus (Mahmudi, 2010).

Pemerintah melalui UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur agar daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerahnya. Hal ini dikarenakan pengeluaran berupa belanja pegawai ini bersifat rutin dan berkebalikan dengan belanja modal.

Warren Thompson memperkenalkan teori “transisi demografis” yang menggambarkan perubahan pola kelahiran dan kematian seiring dengan perkembangan ekonomi. Menurut teori ini, masyarakat bergerak melalui empat tahap: pra-industri (kelahiran dan kematian tinggi), transisi awal (kematian menurun, kelahiran tetap tinggi), transisi akhir (kelahiran menurun), dan post-transisi (kelahiran dan kematian rendah). Teori ini menjelaskan bagaimana kepadatan penduduk berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial (Thompson, 1929). (Halim, 2007) menerangkan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan potensi PAD karena banyaknya penduduk yang ada pada suatu daerah dapat meningkatkan basis pajak daerah dan retribusi. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk, semakin besar peluang pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak serta retribusi. Dalam menentukan angka kepadatan penduduk, Badan Pusat Statistik Indonesia menetapkan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Pada rumus tersebut, untuk menemukan angka kepadatan penduduk maka dapat dengan menghitung jumlah penduduk dibagi luas wilayah (km²) (BPS, 2023).

Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori tersebut adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa 2016-2023;

H2: Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa 2016-2023;

H3: Terdapat pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa 2016-2023;

H4: Terdapat pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada

Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa 2016-2023;
H5: Terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Kepadatan Penduduk dengan cara simultan pada Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten serta Kota di Pulau Jawa 2016-2023.

Metode Penelitian

Data yang digunakan bagi variabel penelitian seluruhnya adalah data sekunder dari publikasi resmi yang diperoleh langsung dari website Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (untuk variabel belanja modal dan belanja pegawai) dan Badan Pusat Statistik (untuk variabel indeks pembangunan manusia dan kepadatan penduduk) berupa data panel 93 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, dari tahun tahun 2018 hingga 2022. Model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah model regresi berganda dengan menggunakan pool data, yaitu penggabungan data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

Berikut persamaan model yang digunakan:

$$\ln KKD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln IPM_{it} + \beta_2 \ln BM_{it} + \beta_3 \ln BP_{it} + \beta_4 \ln KP_{it} + e_{it}$$

Penjelasan:

$\ln KKD$ = Logaritma Natural Kemandirian Keuangan Daerah

$\ln IPM$ = Logaritma Natural Indeks Pembangunan Manusia

$\ln BM$ = Logaritma Natural Belanja Modal

$\ln BP$ = Logaritma Natural Belanja Pegawai

$\ln KP$ = Logaritma Natural Kepadatan Penduduk

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

β_2 = Koefisien regresi variabel Belanja Modal (Milyar Rupiah)

β_3 = Koefisien regresi variabel Belanja Pegawai (Milyar Rupiah)

β_4 = Koefisien regresi variabel Kepadatan Penduduk (Orang/km²)

i = Wilayah analisis (93 Kabupaten & Kota di Pulau Jawa)

t = Periode tahun analisis (2016 sampai dengan 2023)

e = Error

Hipotesis statistik pada uji t yaitu:

- $H_0: \beta_1 = 0 \rightarrow$ IPM tak berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial di Kabupaten & Kota pada Pulau Jawa 2016-2023. $H_1: \beta_1 \neq 0 \rightarrow$ IPM berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah dengan parsial di Kabupaten & Kota pada Pulau Jawa 2016-2023.
- $H_0: \beta_2 = 0 \rightarrow$ Belanja Modal tak berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah dengan parsial di Kabupaten & Kota pada Pulau Jawa 2016-2023. $H_1: \beta_2 \neq 0 \rightarrow$ Belanja Modal berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Kabupaten & Kota di Pulau Jawa 2016-2023.
- $H_0: \beta_3 = 0 \rightarrow$ Belanja Pegawai tak mendapat pengaruh parsial pada Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten & Kota pada Pulau Jawa 2016-2023. $H_1: \beta_3 \neq 0 \rightarrow$ Belanja Pegawai berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah dengan parsial di Kabupaten & Kota di Pulau Jawa 2016-2023.
- $H_0: \beta_4 = 0 \rightarrow$ Kepadatan Penduduk tak berpengaruh parsial pada Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten & Kota pada Pulau Jawa 2016-2023. $H_1: \beta_4 \neq 0 \rightarrow$ Kepadatan Penduduk berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah dengan parsial di Kabupaten serta Kota pada Pulau Jawa 2016-2023.

Dengan parameter sebagai berikut;

- Saat angka t statistik $> t$ tabel ataupun $-t$ statistik $< -t$ tabel artinya H_0 ditolak, hasilnya yaitu tak tolak H_1 ;
- Saat angka t statistik $< t$ tabel atau $-t$ statistik $> -t$ tabel artinya H_1 ditolak, hasilnya yaitu tidak tolak H_0 .

Hipotesis statistik uji F yaitu sebagai berikut.

- $H_0: \beta_i = 0$ artinya Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Pegawai, serta Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh dengan simultan pada Kemandirian Keuangan Daerah pada 93 Kabupaten serta Kota pada Pulau Jawa 2016-2023.
- $H_1: \beta_i \neq 0$ artinya Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Pegawai, serta Kepadatan Penduduk berpengaruh simultan

pada Kemandirian Keuangan Daerah 93 Kabupaten serta Kota pada area Jawa 2016-2023.

Dengan parameter sebagai berikut:

- Saat angka F-statistik $>$ F-tabel dengan probabilitas $< \alpha$ (0,05), artinya H_0 ditolak, hasilnya yaitu tidak tolak H_1 ;
- Saat angka F-statistik $<$ F-tabel dengan probabilitas $> \alpha$ (0,05), artinya H_1 ditolak, hasilnya yaitu tak tolak H_0 .

Hasil dan Pembahasan

Uji penentuan model terbaik dilakukan untuk menentukan model apa yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut hasil chow-test untuk mengetahui model sementara dan hausman-test untuk menentukan model tetap.

Diketahui nilai Prob.Cross-Section Chi-Square $< \alpha$ (0,05). Karena nilai probabilitasnya di bawah α maka model sementara menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Didapati bahwa nilai Prob. Cross-Section Random $< \alpha$ (0,05) maka model yang diterapkan pada penelitian ini merupakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Selanjutnya untuk mengetahui data pada penelitian terdistribusi secara normal atau tidak agar penelitian dapat dilanjutkan maka dilakukan uji normalitas. Berikut ini hasilnya.

Nilai Jarque-Bera menunjukkan sebesar 3,550166, maka Jarque-Bera $3,550166 < 803,3524631$ Chi Square tabel atau dapat dilihat juga dari Probability $> \alpha$ yaitu $0.169469 > 0,05$ dan menyatakan data berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

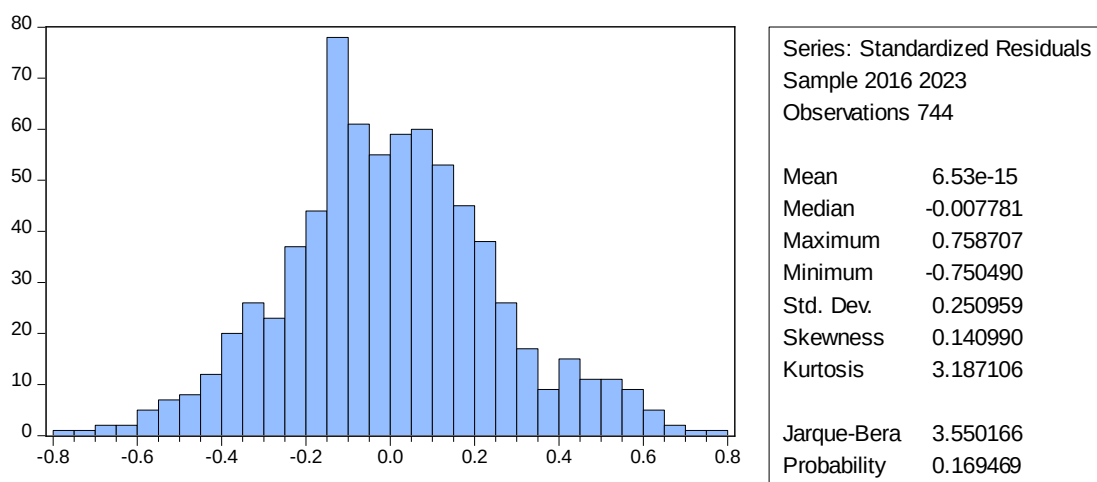
Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-Section F	26.556741	(92,647)	0.0000
Chi-Square	1163.356586	92	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-Section Random	42.481426	4	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10



Gambar 6. Uji Normalitas

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Berikutnya uji asumsi klasik yaitu serangkaian tes statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa model regresi linear memenuhi beberapa asumsi dasar yang diperlukan agar estimasi parameter model tersebut menjadi valid dan reliabel. Uji ini juga akan menunjukkan apakah data memenuhi standar BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) atau tidak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.

Nilai koefisien korelasi antar variabel independen $< 0,80$ maka hubungan linear yang tinggi antar variabel tidak terjadi yang artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Nilai R-Squared dengan $\alpha = 5\%$ (0,05) dan *degree of freedom* memperoleh nilai Chi-Square hitung $<$ Chi-Square tabel atau $690,196152 < 803,3524631$ sehingga didapati hasil bahwa persamaan penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas.

Hasil estimasi uji autokorelasi $dU (1,89076) < DW (1,921603) < 4-dU (2,10924)$ dan dinyatakan

terbebas dari masalah autokorelasi.

Kemudian untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam data maka dilakukan estimasi model yaitu proses menentukan nilai parameter dalam sebuah model statistik berdasarkan data yang tersedia. Berikut hasilnya.

Tabel 7 dapat dituliskan ke dalam bentuk model sebagai berikut:

$$\text{KKDit} = -9,956257 + 2,938627 \text{ IPMit} - 0,001339 \text{ BMit} - 0,133255 \text{ BPit} + 0,167172 \text{ Kpit}$$

Penjelasan:

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

BM : Belanja Modal

BP : Belanja Pegawai

KP : Kepadatan Penduduk

i : Cross Section

t : Time Series

ε : Error

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Kepadatan Penduduk
Indeks Pembangunan Manusia	1.000000	-0.150922	-0.188449	0.712248
Belanja Modal	-0.150992	1.000000	0.744985	-0.104378
Belanja Pegawai	-0.188449	0.744985	1.000000	-0.200793
Kepadatan Penduduk	0.712248	-0.104378	-0.200793	1.000000

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

R-Squared	Chi-Square hitung	Chi-Square tabel	Hasil
0,927683	690,196152	803,3524631	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Metode Panel FEM	Nilai dU	Nilai DW	Nilai 4-dU	Keterangan
No weight	1,89076	1,921603	2,10924	Tidak mengalami autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 7. Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien
C	-9,956257
Indeks Pembangunan Manusia	2,938627
Belanja Modal	-0,001339
Belanja Pegawai	-0,133255
Kepadatan Penduduk	0,167172

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 8. Uji Statistik t (Parsial)

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Prob	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	2,938627	8,789266	1,963	0,0000	Berpengaruh dan signifikan
Belanja Modal	-0,001339	-0,076811	-1,963	0,9388	Tidak berpengaruh dan tidak signifikan
Belanja Pegawai	-0,133255	-2,069678	-1,963	0,0389	Berpengaruh dan signifikan
Kepadatan Penduduk	0,167172	1,976021	1,963	0,0486	Berpengaruh dan signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 9. Uji Statistik F (Simultan)

F-hitung	F-tabel	Prob	Taraf α	Keputusan
86,45524	5,63	0,000000	0,05	Terdapat pengaruh secara simultan

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R-Squared 0,927683

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Eviews 10

Interpretasi:

- Indeks Pembangunan Manusia: Ketika nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 1% maka kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 2,93%.
- Belanja Modal: Ketika nilai belanja modal meningkat sebesar 1% maka nilai kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan senilai -0,001%.
- Belanja Pegawai: Ketika nilai belanja pegawai meningkat sebesar 1% maka nilai kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan senilai -0,13%.
- Kepadatan Penduduk: Ketika angka kepadatan penduduk naik sebesar 1% maka nilai kemandirian keuangan daerah mendapat peningkatan sebanyak 0,16%.

Selanjutnya uji hipotesis statistik yaitu metode yang digunakan untuk membuat keputusan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Pengujian yang menunjukkan apakah terdapat pengaruh tiap-tiap variabel tak terikat dengan cara parsial (individual) dalam menerangkan variabel terikat disebut dengan uji statistik t. Penelitian ini memakai taraf kesalahan sebesar α (0,05) serta degree of freedom (df) = $n - k = 744 - 5 = 739$. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8.

Interpretasi:

- Nilai t-hitung IPM > t-tabel yaitu sebesar

8,789266 > 1,963 maka keputusannya ialah H_0 ditolak. Artinya mendapat pengaruh IPM pada kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2016 sampai dengan 2023. Karena probabilitas $\beta_1 > \alpha$ (0,05) yaitu $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah signifikan.

- Nilai -t-hitung belanja modal > -t-tabel yaitu berada di angka sebesar $-0,076811 < -1,963$ maka keputusannya adalah H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2016 sampai dengan 2023. Karena probabilitas dari $\beta_2 > \alpha$ (0,05) yaitu $0,9388 > 0,05$ maka keputusannya adalah tidak signifikan.
- Nilai -t-hitung belanja pegawai < -t-tabel yaitu sebesar $-2,069678 < -1,963$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2016 sampai dengan 2023. Karena probabilitas dari $\beta_3 < \alpha$ (0,05) yaitu $0,0389 < 0,05$ maka keputusannya adalah signifikan.
- Nilai t-hitung kepadatan penduduk > t-tabel yaitu sebesar $1,976021 > 1,963$ maka keputusannya adalah tolak H_0 . Artinya terdapat pengaruh kepadatan penduduk pada kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun

2016 sampai dengan 2023. Karena probabilitas dari $\beta_4 < \alpha$ (0,05) yaitu 0,0486 < 0,05 maka keputusannya ialah signifikan.

Berikutnya pengujian dengan menyeluruh seluruh variabel independen pada model dalam variabel dependen bisa dilaksanakan dengan pengujian simultan (uji f). Pada penelitian ini df1 (N1) menggunakan rumus $k-1 = 5 - 1 = 4$ dan df2 (N2) menggunakan rumus $n-k = 744 - 5 = 739$ untuk menentukan F-tabel dan menggunakan taraf kesalahan sebesar α (0,05).

Nilai F-hitung > F-tabel yaitu sebesar 86,45524 > 5,63 yang artinya H_0 ditolak atau terdapat pengaruh secara simultan seluruh variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, serta Kepadatan Penduduk pada variabel dependen yakni Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2023. Kemudian untuk menggambarkan besarnya variabel dependen bisa diterangkan oleh variabel independen maka dilakukan pengujian determinasi (R^2). Hasilnya dapat dilihat pada tabel 9.

Didapati bahwa hasilnya mendekati 1 yang artinya variabel-variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Besarnya pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, serta Kepadatan Penduduk adalah sebesar 92,76 persen terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. sebaliknya sisanya sebanyak 7,24% dijelaskan oleh variabel lain yang tak disertakan dalam model estimasi regresi dan panel dalam model estimasi regresi data panel pada kajian ini.

Pengaruh IPM terhadap KKD

Dari hasil regresi di atas didapati bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien 2,93% yang artinya peningkatan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan IPM secara parsial (*ceteris paribus*). Hasil tersebut sejalan dengan teori yang ada yaitu *Human Capital* oleh Becker (1993) yang menyatakan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama dari modal manusia. Becker berargumen bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu dan, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Anisa, 2023, Fatkhurohman, 2022, dan Tabroni, 2020 yang

menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan IPM yang lebih tinggi, daerah-daerah di Pulau Jawa mampu meningkatkan kemandirian finansial mereka, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini penting karena ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola anggaran mereka sendiri.

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang mencerminkan peningkatan IPM di kabupaten dan kota di Pulau Jawa memiliki efek jangka panjang yang sangat positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan standar hidup dan kualitas hidup tidak hanya menarik investasi domestik dan asing tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas. Daerah dengan IPM yang tinggi dapat menarik lebih banyak investor karena mereka menawarkan sumber daya manusia yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih stabil untuk bisnis. Perlu diperhatikan bahwa kabupaten dan kota di Pulau Jawa memiliki karakteristik yang beragam antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang biasanya memiliki IPM lebih tinggi, menunjukkan kemandirian keuangan yang lebih kuat karena basis ekonomi yang lebih beragam dan kuat. Sementara itu, kabupaten yang lebih pedesaan mungkin menunjukkan peningkatan yang lebih lambat dalam IPM dan kemandirian keuangan, tetapi peningkatan IPM tetap memberikan dampak positif yang signifikan. Upaya peningkatan IPM di daerah pedesaan bisa difokuskan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pengaruh BM terhadap KKD

Hasil dari belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial (*ceteris paribus*). Teori *Capital Expenditure and Economic Growth* oleh Musgrave (1989) mengemukakan bahwa belanja modal pemerintah merupakan investasi dalam aset jangka panjang yang penting untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, meski demikian Permendagri No. 13 tahun 2006 memberikan pengertian belanja modal dan memaknainya sebagai ongkos yang dikeluarkan guna membeli atau membangun aktiva tetap yang berbentuk riil dengan usia ekonomis lebih dari satu tahun dan dapat digunakan untuk aktivitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah (BPK,

2006). Sesuai dengan pengertian yang disampaikan bahwa belanja modal ini merupakan belanja yang dilakukan untuk infrastruktur dan sarana-sarana lain yang mendukung pembangunan daya ekonomi suatu daerah dan dampaknya baru akan terasa setelah lebih dari satu tahun dan karenanya tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada tahun yang sama pada tahun dialokasikannya belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan (Anisa, 2023), Wahyuni & Ardini (2018) yang menghasilkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh BP terhadap KKD

Selanjutnya belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien $-0,13\%$ yang artinya peningkatan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara langsung oleh penurunan belanja pegawai, begitupun sebaliknya secara parsial (*ceteris paribus*). Hasil ini sejalan dengan Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*) James M. Buchanan bersama Gordon Tullock Buchanan (1962). Teori ini menganalisis perilaku pegawai pemerintah dan pembuat kebijakan dalam konteks pengeluaran publik, termasuk belanja pegawai. Buchanan berargumen bahwa pegawai pemerintah cenderung memperbesar anggaran mereka untuk memaksimalkan utilitas pribadi mereka, yang bisa berujung pada inefisiensi dan pembengkakan biaya pemerintah. Belanja pegawai dalam konteks ini dipandang sebagai hasil dari interaksi antara birokrat dan politikus yang saling berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan masing-masing. Selain itu, juga karena belanja pegawai ini bersifat rutin dan bukannya ditujukan pada pembangunan infrastruktur daerah. Sekalipun pegawai memperoleh gaji, tunjangan, dsb yang pada implementasinya dapat juga memutarakan roda perekonomian daerahnya namun tidak selalu dana-dana tersebut dibelanjakan di daerahnya sendiri. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian oleh Wardani (2023), Wahyuni & Ardini (2018) yang menyatakan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah secara negatif.

Tingginya belanja pegawai mengurangi alokasi anggaran untuk belanja modal yang produktif, seperti investasi infrastruktur dan proyek ekonomi yang bisa meningkatkan PAD. Di banyak kabupaten dan kota di Pulau Jawa, peningkatan belanja pegawai sering kali terjadi bersamaan dengan penurunan belanja modal, yang

mengakibatkan terbatasnya perkembangan ekonomi lokal dan penurunan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Belanja pegawai yang tinggi cenderung menyebabkan penurunan investasi di sektor-sektor penting yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai memiliki keterbatasan dana untuk investasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan basis pajak daerah. Tingginya belanja pegawai bisa menjadi indikasi inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Misalnya, bisa terdapat kelebihan tenaga kerja atau struktur gaji yang tidak sebanding dengan produktivitas pegawai. Kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang menunjukkan inefisiensi dalam belanja pegawai cenderung memiliki kemandirian keuangan yang lebih rendah, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi produktif terpakai untuk belanja rutin pegawai. Pengaruh belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah tidak seragam di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Daerah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung lebih mampu menyeimbangkan belanja pegawai dengan investasi produktif dibandingkan daerah dengan PAD yang lebih rendah. Kabupaten dan kota yang memiliki basis ekonomi yang lebih kuat mampu mengurangi dampak negatif dari belanja pegawai melalui diversifikasi pendapatan dan manajemen anggaran yang lebih efisien.

Pengaruh KP terhadap KKD

Kemudian hasil kepadatan penduduk menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien $0,16\%$ yang artinya peningkatan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan kepadatan penduduk secara parsial (*ceteris paribus*). Hasil ini sesuai dengan Teori Transisi Demografis oleh Thompson (1929) yang menggambarkan perubahan pola kelahiran dan kematian seiring dengan perkembangan ekonomi. Hal ini akan menuntut konsumsi yang tinggi dari masyarakat dengan penduduk yang padat atas produk barang dan jasa, hal ini berbanding lurus untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak. Selain itu juga dengan konsumsi yang tinggi di masyarakat akan menstimulus para produsen untuk memaksimalkan produksinya dan pemasarannya salah satunya dengan pemasangan iklan dan pajak daerah melalui reklame pun meningkat dan hal ini didukung oleh Halim (2007)

yang menerangkan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan potensi PAD karena banyaknya penduduk yang ada pada suatu daerah dapat meningkatkan basis pajak daerah dan retribusi. Penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Ardiyanto & Saleh (2023) serta Ahyani & Saleh (2016) yang menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah secara positif. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan kendaraan, serta retribusi seperti izin usaha dan tempat rekreasi. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi yang lebih tinggi di daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih besar. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa publik, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini memicu peningkatan PAD karena adanya kebutuhan yang lebih besar untuk dibiayai oleh pemerintah daerah.

Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memanfaatkan manfaat ekonomi skala dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik. Biaya per kapita untuk penyediaan infrastruktur ini dapat lebih rendah, meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah. Pemerintah daerah secara umum mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat ketika penduduk meningkat. Hal ini karena meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Dengan populasi yang lebih besar, Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa menjadi pasar konsumen yang lebih besar bagi barang dan jasa lokal. Hal ini meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak penjualan dan pajak lainnya yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak penghasilan perusahaan dan pajak lainnya. Pertumbuhan penduduk sering kali diikuti dengan urbanisasi yang dapat meningkatkan spesialisasi pekerjaan dan produktivitas. Ini dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kontribusi pajak penghasilan individu terhadap PAD daerah. Urbanisasi juga membawa dampak positif pada diversifikasi ekonomi daerah, memperluas sektor usaha dan pekerjaan, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pengaruh Simultan IPM, BM, BP dan KP terhadap KKD

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, belanja modal, belanja pegawai, dan kepadatan penduduk sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen dengan nilai F-hitung ($86,45524$) > F-tabel ($5,63$). Analisis simultan dari faktor-faktor ini penting agar didapati pengaruh seluruh variabel independen yaitu IPM, belanja modal, belanja pegawai, dan kepadatan penduduk secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Pengelolaan yang baik dari IPM, belanja modal, belanja pegawai, dan kepadatan penduduk dapat menghasilkan sinergi yang positif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, ketidakseimbangan atau pengelolaan yang buruk dari salah satu faktor dapat menghambat potensi kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang optimal, perlu strategi yang komprehensif dalam meningkatkan IPM, mengelola belanja modal dan pegawai dengan efisien, serta mengatur pertumbuhan kepadatan penduduk secara berkelanjutan.

Hasil pengujian koefisien determinasi menghasilkan nilai R-Squared (R^2) sebesar 0.927683 . Hal itu menyatakan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen pada kabupaten dan kota di pulau Jawa 2016-2023. Dapat dikatakan besarnya pengaruh dari indeks pembangunan manusia, belanja modal, belanja pegawai, serta kepadatan penduduk adalah sebesar $92,76$ persen terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebanyak $7,24$ persen dipaparkan variabel lain yang tak disertakan pada model estimasi regresi dan panel dalam model estimasi regresi data panel pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan dan diterapkan karena memenuhi uji-uji yang diperlukan dalam mencapai hasil penelitian yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*; merupakan ketentuan pada uji-uji statistik yang mengharuskan data penelitian lolos agar dapat dianggap sah dan kredibel).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil temuan penelitian ini telah membuktikan dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa secara parsial indeks pembangunan berpengaruh

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengerjaannya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah objek sebanyak 93 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, dengan data tahunan antara tahun 2018 sampai tahun 2022. Jumlah variabel independen pada penelitian ini sebanyak 4 variabel yaitu : Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Kepadatan Penduduk dan variabel dependennya adalah Kemandirian Keuangan Daerah.

Saran

Mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Partisipasi dalam program pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dapat membantu mempercepat peningkatan IPM. Masyarakat perlu memahami bahwa belanja pegawai yang tinggi dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, masyarakat dapat mendukung kebijakan efisiensi belanja pegawai dan mengawasi implementasi anggaran daerah.

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih pada program yang dapat meningkatkan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Investasi dalam bidang ini terbukti berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Mengingat belanja pegawai berpengaruh signifikan, pemerintah perlu mengevaluasi dan melakukan reformasi dalam sistem penggajian dan distribusi pegawai. Optimalisasi jumlah dan kualitas pegawai serta pengendalian anggaran belanja pegawai harus menjadi prioritas. Karena kepadatan penduduk berpengaruh signifikan, pemerintah harus mengelola urbanisasi dan distribusi penduduk secara efektif. Penyediaan infrastruktur yang

memadai dan penciptaan lapangan kerja di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Untuk saran kepada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah objek sebagai sampelnya dan dapat menambah variabel lain yang berkaitan dengan adanya pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Ahyani, W., & Saleh, S. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014. *Universitas Gadjah Mada*.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102371>
- Anisa, S. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo).
https://eprints.untirta.ac.id/21618/1/SITI%20ANISA_5553180003_fulltext.pdf
- Ardiyanto, D., & Saleh, S. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Pulau Jawa: Tahun 2015-2020. Universitas Gadjah Mada.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago Press.
<https://www.nber.org/system/files/chapters/c3730/c3730.pdf>
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-73.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- BPK. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- BPS. (2023). *Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km2)*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi--jiwa-km2-.html>
- Buchanan, J. M. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional*

- Democracy. Liberty Fund.
http://files.libertyfund.org/files/1063/Buchanan_0102-03_EBk_v6.0.pdf
- Fatkhurohman, S. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2020*.
<https://eprints.untirta.ac.id/26422/>
- Fukuda-Parr, S., & Kumar, A. K. S. (2003). *Measuring Human Development: A Primer*. Oxford University Press.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Musgrave, R. A. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.nispa.org/files/publications/ebooks/Public-Finance-Theory-and-Practice.pdf>
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytyaliuk, A. (2019). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Development. In *Investment Management and Financial Innovations* (Vol. 16, Issue 3, pp. 29–39). LLC CPC Business Perspectives.
[https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana.
- Tabroni, R. (2020). *Analisis Pengaruh Belanja Modal, PDRB, dan IPM Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2018*. Skripsi.
<https://eprints.untirta.ac.id/15665/2/BAB%202.pdf>
- Thompson, W. S. (1929). *Population*. American Journal of Sociology.
<https://u.demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20T-V/thompson.1929.AJS.population.pdf>
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/203>
- Wardani, D. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Universitas Siliwangi.
<http://repositori.unsil.ac.id/10500/>